

KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN TRANSPARANSI DALAM MENILAI KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Nur Jannah Abdi Aziz¹, Winda Ayu Anggraini², Tiara Pradani³

Universitas Siliwangi^{1,2,3}

jannahaziza@unsil.ac.id¹

windaayu@unsil.ac.id²

tiarapradani@unsil.ac.id³

Abstract

This study aims to explore the effect of financial accountability and transparency on village government performance in managing village finances. The research method used is quantitative method using multiple regression analysis. Data were collected through the distribution of questionnaires, documentation techniques, and interviews. The results showed a significant relationship between financial accountability, transparency, and village government performance. The supporting evidence found in this study states that village governments that have a high level of financial accountability and a good level of transparency tend to have better performance in managing village finances. Next research can be enriched by involving qualitative analysis and involving a wider sample of respondents.

Keywords: *accountability, transparency, performance, village government*

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dana desa merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa.

Akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam pemerintahan desa. Transparansi berarti pemerintahan desa mengelola keuangan secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk melihat dan memahami bagaimana dana digunakan. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban

dalam pertanggungjawaban yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media (Darma, 2019). Hal ini berarti pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas pengelolaan dan penggunaan dana. Keduanya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang tepat dan efektif.

Adanya transparansi dan akuntabilitas, pemerintah desa dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan dana dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana dana digunakan dan dapat memberikan masukan atau kritik yang konstruktif.

Kondisi akuntabilitas dan transparansi di pemerintahan desa saat ini bervariasi tergantung pada masing-masing desa. Namun, secara umum terdapat beberapa masalah atau tantangan yang dihadapi dalam hal akuntabilitas dan transparansi.

Beberapa masalah yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi di kalangan pemerintah desa. Selain itu, terdapat juga kendala dalam hal pengelolaan keuangan desa, seperti kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa, tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif, dan potensi terjadinya penyalahgunaan dana.

Salah satu contoh desa yang mengalami kendala terkait akuntabilitas dan transparansi adalah Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afifah (2022) ditemukan adanya masalah dalam pengelolaan dana desa yang meliputi kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,

dan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam penggunaan dana desa

Akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pemerintahan desa memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat desa. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa (Sugiharti & Hariani, 2021). Ketika masyarakat dapat melihat dan memahami dengan jelas bagaimana dana desa digunakan secara adil dan efektif, mereka akan merasa lebih percaya dan yakin bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan mereka. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi yang baik juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah desa. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan dana desa, mereka dapat memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif, sehingga memperkuat partisipasi mereka dalam pembangunan desa.

Selanjutnya, akuntabilitas dan transparansi yang baik juga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Adanya pemantauan dan umpan balik dari masyarakat, pemerintah desa akan lebih terdorong untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Sellang et al., 2019). Selain itu, akuntabilitas dan transparansi

yang baik juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa secara lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang kuat, masyarakat dapat memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan korupsi. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi yang baik dalam pemerintahan desa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa, termasuk peningkatan kepercayaan, partisipasi aktif, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pengawasan yang efektif.

Ada beberapa kebijakan dan regulasi yang relevan dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Undang-Undang ini menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana desa dan memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya secara akuntabel. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan juga relevan dengan topik ini. Peraturan ini menegaskan bahwa camat bertugas untuk

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Implementasi kebijakan dan regulasi ini dapat bervariasi di setiap daerah tergantung pada konteks dan kondisi masing-masing. Pemerintah desa diharapkan untuk mengadopsi kebijakan dan regulasi ini serta menerapkan praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaporan keuangan yang terbuka dan jelas, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana desa. Dengan implementasi yang baik, kebijakan dan regulasi ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa.

Penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa pada kinerja pemerintah desa sangat penting karena memiliki beberapa tujuan yang relevan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. pemahaman yang lebih baik, pemerintah desa dapat menerapkan praktik-praktik yang tepat untuk memastikan penggunaan dana

desa yang efektif dan adil. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan panduan yang berguna bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja mereka melalui akuntabilitas dan transparansi.

Hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pertama, pemerintah desa akan diuntungkan dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan kinerja dan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah desa. Selain itu, masyarakat desa juga akan diuntungkan karena penelitian ini dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengawasan penggunaan dana desa serta memberikan jaminan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan mereka dengan cara yang adil dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain, akademisi, dan praktisi pemerintahan desa dalam memperluas pemahaman tentang akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi

Teori Agensi menurut Jensen dan Meckling pada tahun 1976, menjelaskan bahwa teori agensi merupakan teori ketidaksesuaian kepentingan antara prinsipal (pihak yang memberikan kewenangan) dan agen (pihak yang menerima kewenangan). Teori ini menganggap bahwa terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dan agent, di mana agent mungkin memiliki motivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan principal. Teori agensi dapat digunakan untuk memahami hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Teori ini berfokus pada bagaimana pemerintah desa dapat bertindak secara akuntabel dan transparan untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2002:20), akuntabilitas publik berarti bahwa pihak pemberi amanah bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*), yang juga memiliki hak

dan wewenang untuk menerima tanggung jawab ini.

Mahmudi (2005: 9) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berarti kewajiban agen untuk mengelola sumber daya publik dan melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan dan aktivitas yang terkait dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi amanah (*principal*). Dari pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berarti kewajiban agen untuk mengelola dan melaporkan semua kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan amanah kepada pemberi amanah (*principal*).

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa

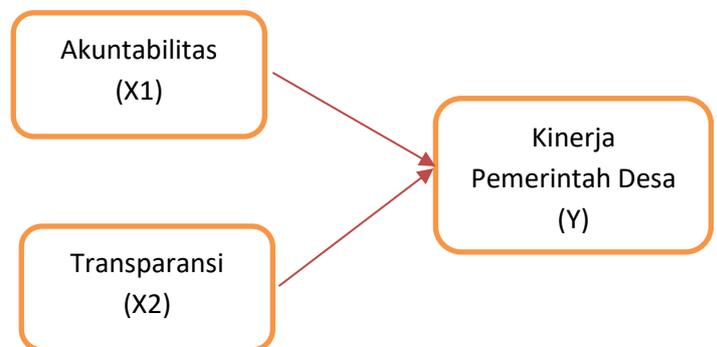
Transparansi

Coryanta (2007) menyatakan bahwa transparansi bergantung pada aliran informasi yang bebas. Semua proses, organisasi, dan informasi pemerintah harus dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi harus cukup untuk dipahami atau dipantau. Anggaran eksekutif dianggap transparan jika memenuhi syarat-syarat berikut: 1) pengumuman kebijakan anggaran; 2) dokumen anggaran tersedia dan mudah diakses; 3) laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu tersedia; 4) menerima saran

dan suara masyarakat; dan 5) ada sistem yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Werimon et al. (2007:8), prinsip transparansi terdiri dari dua komponen: komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Dalam rangka pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat, pemerintah diharapkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat mengenai berbagai hal. Masyarakat berhak untuk mengetahui berbagai tindakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi tugas pemerintahan.

H2 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan observasi langsung di kantor desa yang ada di

Kabupaten Banyumas. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang berupa kuesioner yang menggambarkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah desa sejumlah . Selain itu, data sekunder yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pengolahan data penelitian menggunakan Eviews 9.0 untuk memahami hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Regresi Variabel

Var	Nilai R		Sig.	Kontan (a)	Koefisien (b)
	R	R2			
X1	0,240	0,641		0,347	0,331
X2					0,269

Tabel 1. Hasil Regresi

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai konstanta sebesar 0,347 dan koefisien untuk akuntabilitas sebesar 0,331. Sedangkan nilai koefisien regresi untuk transparansi adalah 0,269, sehingga dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,347 + 0,331 X1 + 0,269 X2 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja pemerintah desa

X1 : Akuntabilitas

X2 : Transparansi

e : error

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Hipotesis pertama dalam penelitian ini, diterima karena menghasilkan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil dari α 5% atau 0,05). Hasil uji regresi menunjukkan bahwa jika nilai akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa lebih besar, lebih banyak kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah desa. Akuntabilitas yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, terutama dalam hal proses pembangunan dan pemberdayaan. Selain itu, akuntabilitas dalam pemerintahan desa dapat meningkatkan birokrasi pemerintahan desa ke jenjang yang lebih tinggi dan mengurangi penyimpangan yang sering terjadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auditya & Lismawati (2021) yang melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian lain yang sejalan dengan

hasil penelitian ini adalah Afifah (2022) dan Darma (2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih tinggi dan akuntabel pada setiap SKPD akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Hipotesis kedua dalam penelitian ini, diterima karena nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari nilai α 5% atau 0,05). Hasil uji regresi menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Salah satu hak masyarakat atas informasi yang diberikan oleh pemerintah mengenai perencanaan dan kebijakan program hingga proses pelaksanaannya adalah transparansi. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat menilai seberapa besar peran pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan melalui pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penilaian masyarakat dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Dengan lebih banyak transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa itu sendiri akan lebih baik dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiwirya

(2015), Pratiwi Umi dan Puji Lestari (2022). Penelitian ini menemukan bahwa secara bersamaan, akuntabilitas dan transparansi berdampak positif pada penganggaran berbasis kinerja. Seperti yang diharapkan, transparansi adalah komponen yang sangat penting dalam pembuatan anggaran berbasis kinerja. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa responden lebih memprioritaskan transparansi atau keterbukaan daripada akuntabilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memberikan kontribusi positif terhadap kinerja pemerintah desa.
2. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara bersama-sama tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan

desa memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kinerja pemerintah desa.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah desa dan pihak terkait harus meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan anggaran,
2. Perlu adanya pengawasan dari pihak ektrnal terhadap proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,
3. Pemerintah desa diharapkan lebih terbuka pada kebutuhan Masyarakat sehingga memudahkan Masyarakat untuk lebih aktif dalam melaksanakan Pembangunan desa,
4. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan ada penilaian kinerja berdasarkan outcome atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah desa melalui kegiatan dan program yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, U. (2022). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.*

Auditya, L., & Lismawati, H. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.11184>

Coryanata, Isma. 2011. Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). ISSN 1411-6227. Jurnal. Vol 12 Nomor 2. Halaman 121-235. Universitas Bengkulu.

Darma, N. D. A. (2019). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UUP STIM YKPN

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Pratama, D., Lestari, P., & Pratiwi, U. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desadalam Pengelolaan Dana Desa. *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB)*, 1(01), 1–16.

Sellang, K., Ahmad, J., & Mustanir, A. (2019). *Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik* (Issue August).

Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021).
Dampak Akuntabilitas, Transparansi
Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan
Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen
Dan Bisnis*, 6(1), 11–18.
<https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa